



**Judul** : Kinerja DPR : Kunker Jangan Dipaksakan  
**Tanggal** : Rabu, 19 September 2012  
**Surat Kabar** : Suara Karya  
**Halaman** : 3

## KINERJA DPR

# Kunker Jangan Dipaksakan

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Sekjen DPP Partai Golkar yang juga anggota anggota Komisi II DPR, Azhar Romli mengatakan, kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan ke luar negeri untuk melakukan studi banding sebenarnya tidak perlu dipaksakan jika memang tidak terlalu urgen kepentingannya. Namun jika tetap harus dilakukan hendaknya dipilah-pilah mana yang perlu dan mana yang tidak.

Karena, menurut Azhar Romli, melakukan kunjungan ke luar negeri membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika tidak terlalu penting manfaatnya, kata Azhar hanya akan menghabiskan biaya negara saja.

"Melakukan studi banding ke luar negeri memang penting, apalagi jika itu menyangkut pembuatan undang-undang. Karena undang-undang kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi global dunia. Tapi, kunjungan kerja ke luar negeri ini juga harus dipilah-pilah, mana yang memang urgen dan mana yang tidak. Kalau memang urgen silahkan saja, tapi kalau tidak, ya tidak usah lah, nanti DPR malah menjadi sorotan publik terus menerus," kata Azhar Romli kepada *Suara Karya* di gedung DPR kemarin.

Karena itu, Azhar Romli juga mengimbau rekan-rekannya di DPR agar berhati-hati dalam melakukan berbagai hal; termasuk kunjungan kerja keluar negeri. Memang, kata Azhar, kunjungan kerja ke luar negeri ada dalam UU MD3, tapi jika urgensinya tidak tinggi dan biayanya terlalu besar, sebaiknya ditunda saja. "Kunker ke luar negeri itu juga diatur dalam UU, tapi DPR tetap harus menimbang-nimbang perasaan rakyat," katanya.

Seperti diberitakan, sebanyak 22 anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR yang terbagi dalam dua tim, mulai Senin (3/9) hingga Jumat (7/9) berada di Turki dan Denmark dengan dalih untuk studi banding Rancangan Undang-Undang (RUU) Palang Merah Indonesia (PMI). Biayai untuk studi banding ke Eropa itu, negara harus mengeluarkan dana Rp 1,3 miliar dengan rincian Rp 636 juta untuk ke Turki dan Rp 666 juta untuk ke Denmark.

Karena itu kemudian muncul desakan berbagai pihak agar DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri menyusul hebohnya kunker anggota DPR RI ke Turki dan Denmark ini. Moratorium yang disasar adalah studi-studi banding ke luar negeri guna penyusunan suatu RUU sebaiknya ditiadakan saja. Cukup kunker yang dipertahankan menyangkut hubungan antar lembaga keparlemenan saja, yang menyangkut institusi keparlemenan. Selebihnya dihapus sama sekali. (Kartoyo DS)